



**RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**

TAHUN 2022



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR



Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Penyerahan presidensi G20 di Roma, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia melalui tema besar "*Recover Together, Recover Stronger*" akan mendorong pertumbuhan yang inklusif, *people-centered*, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.

Salah satu bentuk dalam mendorong pertumbuhan yang *inklusif, people-centered*, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ekonomi Hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Secara geomorfologi wilayah Sumatera Barat lebih dari 30 (tiga puluh) persen bergunung dan berbukit, yang berada pada patahan semangka serta pertemuan lempeng Euroasia dan Indo-Australia, maka dalam menetapkan kebijakan dan program, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengelola sumberdaya alam dan sangat mendukung program-program yang inklusif, *people-centered*, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yaitu "**Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan**".

Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 3,29 %, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksi -1,62%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan lebih terkelola kasus COVID-19 di tahun 2021. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata. Sektor ini tentunya sangat perlu didukung oleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 memberi gambaran yang dibutuhkan tentang lingkungan hidup Sumatera Barat melalui analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response* (DPSIR).

Akhir kata saya menghimbau semua pemangku kepentingan untuk menggunakan data Dokumen IKPLHD dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing.



1. Pendahuluan

Tema "*Recover Together, Recover Stronger*" yang digaungkan dalam perhelatan G20 sudah tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Sumatera Barat siap menerapkan jalur pembangunan yang lebih ambisius yang mampu mengatasi tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil juga membangun daerah pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif, berdasarkan keadaan dan prioritas daerah.

Sumatera Barat telah menciptakan kerja-kerja nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan yang pada dasarnya merupakan penerapan dari praktek ekonomi hijau. Perekonomian yang terus bertumbuh sepanjang tahun 2021 telah berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi -1,62% (yoy). Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2021 tercatat sebanyak 339,93 ribu jiwa, menurun dibandingkan dengan September 2020 sebanyak 364,79 ribu jiwa.

Pembangunan di Sumatera Barat tahun 2021 dapat dikatakan dalam kategori "hijau" karena nyatanya pertumbuhan ekonomi ini tidak menyebabkan degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup dengan dipertahankannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera Barat masih baik (IKLH = 77,29). Khusus perhitungan IKLH tahun 2021 ini dilakukan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air laut (IKAL). Apabila ditambahkan IKAL maka IKLH tahun 2021 menjadi 73,58 dengan kotegori juga baik.

Partisipasi aktif dan kolaborasi berbagai pihak dalam berbagai kegiatan inovatif merupakan penopang utama keberhasilan agenda pembangunan di

Sumatera Barat dalam mewujudkan Visi “**Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan**”.

2. Maksud dan Tujuan

Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Tahun 2021 ini disusun dengan maksud menggambarkan *Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response* (DPSIR) terhadap tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, perkotaan dan tata kelola dalam kaitan dengan program-program unggulan dan inovasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dokumen disusun oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-563-2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tim ini akan mencoba memberikan nilai tambah dari dokumen ini dengan menganalisa kondisi lingkungan Sumatera Barat dengan tujuan diantaranya melihat kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi hijau.

3. Isu Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan konsultasi publik disimpulkan bahwa isu lingkungan hidup strategis di Sumatera Barat adalah, alih fungsi lahan berupa kerusakan hutan dan alih fungsi lahan pertanian, penurunan kualitas air sungai, permasalahan sampah, intensitas bencana alam yang masih cukup tinggi terutama bencana banjir dan longsor. Isu lingkungan hidup strategis tersebut telah ditetapkan oleh Surat Pernyataan oleh Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/915/TL-2022 Tanggal 12 Agustus 2022

4. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dari perubahan kualitas lingkungan bermula dari adanya pertumbuhan penduduk yang menimbulkan aktifitas ekonomi dan pembangunan sarana prasana penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah

sebanyak 5,58 juta jiwa mengalami penambahan sekitar 45,76 ribu jiwa dari tahun 2020 atau bertumbuh sebanyak 1,10% (BPS Prov. Sumbar, 2022). Lebih jauh dapat dijabarkan sumber dan bentuk tekanan sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan aktifitas ekonomi akan berbeda terhadap tata guna lahan dibanding sumber daya air, sumberdaya udara, lingkungan perkotaan. Adapun kebencanaan merupakan dampak yang ditimbulkan karena tekanan yang terjadi telah menggeserkan keseimbangan alam.

5. Kondisi Lingkungan umum, Status, Tekanan dan Dampak

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota), 179 Kecamatan dengan 259 Kelurahan dan 760 Nagari memiliki luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$. *Geomorfologi*, wilayah Sumatera Barat memiliki ketinggian yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian $> 3000 \text{ m}$ di atas permukaan laut (dpl). Sekitar 30,41% luas areal Sumatera Barat berada pada dataran rendah ketinggian 0 - 100 m dpl, sisanya merupakan dataran sedang, tinggi hingga pergunungan.

Sumatera Barat merupakan daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Eurasia di bagian utara. Terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sesar/papatah besar yang memanjang searah tumbukan kedua lempeng tersebut di rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam iklim tropika basah yang memiliki kisaran suhu antara $18^{\circ} - 34^{\circ}\text{C}$ dengan suhu rata-rata $\pm 25,5^{\circ}\text{C}$. Kondisi (*state*) tersebut diatas menyebabkan sumberdaya lahan Sumatera Barat subur dengan hutan tropis yang lebat dan keanekaragaman hayati tinggi juga menjadi hulu dari banyak sungai yang mengalir ke Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau serta ke Samudera Hindia .

Terdapat 4 (empat) Wilayah Sungai, \pm 3.303 sungai dengan 606 sungai telah teridentifikasi, 76 (tujuh puluh enam) embung dan perairan laut yang terbentang sepanjang 2.420 km yang terdapat \pm 185 pulau-pulau kecil yang bisa dikembangkan untuk keperluan usaha perikanan, pengembangan hutan mangrove, terumbu karang.

Peruntukan lahan paling luas adalah untuk kawasan pertanian seluas 1.278.088 Ha (30,22%) disusul kawasan konservasi 796.604 Ha (18,83%), hutan lindung 719.989 Ha (17,02%), dan perkebunan 576.012 Ha (13,62%). Penggunaan lahan justru terluas adalah kawasan hutan 55% baik yang berada di kawasan lindung maupun areal penggunaan lain. Aktifitas yang dianggap memberi tekanan terhadap perubahan bentang alam dan kerusakan hutan adalah kegiatan pertambangan, pembangunan infrastruktur yang melintasi hutan dan pemanfaatan hutan untuk penggunaan lain. Terdapat 19,75 % laju kerusakan hutan. Laju ini sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kasus kebakaran hutan. Namun demikian dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor kehutanan maka terjadi laju peningkatan tutupan hutan dari 64,15% tahun 2020 menjadi 64,20% ditahun 2021.

Alih fungsi lahan pertanian terjadi 7,87% yaitu seluas 272.391,95 Ha dari 295.664,47 Ha pada tahun 2020. Alih fungsi lahan yang paling besar yaitu lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sebesar 65%. Namun dengan kebijakan yang terstruktur untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan terintegrasi dengan berbagai sektor maka pada tahun 2021 ini lapangan usaha pertanian ini menunjukkan pertumbuhan positif yaitu 2,72 %.

Tekanan terhadap sumberdaya air berupa buangan limbah domestik dari sanitasi masyarakat di sempadan sungai yang masih buruk. Selain itu masih banyaknya sampah yang dibuang di sungai. Untuk air danau maka masalah keramba dan status *hipereutrofik* di Danau Maninjau menjadi isu prioritas sudah sampai tingkat nasional. Berdasarkan pada pemantauan

kualitas air pada 9 (sembilan) sungai lintas kabupaten/kota didapatkan hasil perhitungan dengan nilai IKA 79,00. Nilai IKA ini sebenarnya meningkat dari tahun 2020 yaitu 75, namun tetap menjadi isu di tahun ini karena tingginya parameter total coliform dan merata di hampir 80% sungai. Untuk kualitas air laut, nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 83,75 dengan kategori baik.

Perkiraan jumlah timbulan sampah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 2.264,74 ton/hari (Catatan : tidak termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman karena tidak menginput data pada Sistem SIPSN tahun 2021). Terdapat 16 (enam belas) unit TPA di Provinsi Sumatera Barat, 7 (tujuh) unit TPA masih beroperasi secara *open dumping*, 9 (sembilan) unit TPA sudah beroperasi secara *controlled landfill*. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang melarang mengoperasikan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah secara terbuka (*open dumping*) paling lama 5 (lima) tahun setelah UU tersebut diberlakukan. capaian pengelolaan sampah pada tahun 2021 dibawah target yaitu adalah 61,25% yang terdiri dari 11,72 % pengurangan sampah dan 49,54% penanganan sampah. Hal ini masih dibawah dari target yang ditetapkan dalam JAKSTRADA (Kebijakan Strateges Daerah) dalam pengelolaan sampah yaitu 98% yang terdiri dari 24% pengurangan sampah dan 74% penanganan sampah.

Tekanan akibat pengelolaan sampah yang belum optimal dan dibuang kemedia lingkungan termasuk sungai, berdampak pada penurunan kualitas air, peningkatan gas rumah kaca beberapa TPA telah *over capacity* termasuk TPA Regional Payakumbuh. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari hal ini akan mencederai pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat yang notabene merupakan sektor ekonomi hijau

Bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 didominasi oleh bencana hidrometeorologi yaitu bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti longsor, banjir, angin kencang, kebakaran hutan

dan lahan, kekeringan dan abrasi. Sepanjang tahun 2021, hampir semua kejadian bencana meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Data dari BPBD Provinsi Sumatera Barat menginventarisir jumlah kejadian bencana pada tahun 2021 adalah 658 laporan kejadian angin kencang, 113 kejadian bencana banjir, 107 kejadian bencana longsor, puluhan hektar sawah mengalami kekeringan, 2.068 Ha lahan dan hutan yang terbakar dan kejadian abrasi yang terjadi pada 3 (tiga) wilayah pesisir di Sumatera Barat.

6. Upaya dan Inovasi

Kesadaran Pemerintah Sumatera Barat akan kondisi umum, isu prioritas lingkungan hidup dan kekhususan ekologis serta kearifan lokal Sumatera Barat mendorong untuk menerapkan Ekonomi hijau program-program unggulan dan inovasi-inovasi. Program-program unggulan yang dicanangkan secara langsung ataupun tidak langsung mendorong agar hidup tetap terjaga baik, mengendalikan dan memulihkan kerusakan dan pencemaran yang terdali baik serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan mendorong energi terbarukan, diantaranya : Peningkatan pendapatan petani dengan industrialisasi dan hilirisasi produk pertanian; Sumatera Barat sebagai lumbung jagung dan beras nasional; penguatan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan mencetak 100 ribu milineal sebagai *entrepreneur* dan pelaku usaha kreatif; mencetak Minang *Women Entrepreneur* (pengusaha perempuan); Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas internasional dan 19 destinasi wisata unggulan yang kesemuanya berbasis pada alam dan budaya; bahkan diantaranya ditetapkan oleh Unesco sebagai cagar budaya yaitu wisata tambang Sawahlunto; Perlindungan hutan sekaligus masyarakat hutan melalui pengembangan 227.871,80 Ha Perhutanan Sosial yang meliputi hutan nagari, hutan kemasyarakatan, tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan serta capaian energi baru terbarukan 28,19 % Energy

Baru Terbarukan (EBT) tahun 2021 melalui pembangunan PLTMH, PLTM, panas bumi, tenaga surya dan biomassa.

Program-program unggulan yang menjadi inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sekaligus yang dapat meningkatkan ekonomi hijau di Provinsi Sumatera Barat antara lain

1. Budidaya Lebah Madu Dalam Gerakan Minum Madu Asli (GEMMA). Gubernur Sumatera Barat telah meluncurkan Gerakan Minum Madu Asli (GEMMA) pada tanggal 31 Mei 2021 dan membagikan secara simbolis sebanyak 2.400 stup lebah Trigona kepada Lembaga Pengelola Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan di seluruh Sumatera Barat.
2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Sumatera Barat
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 jumlah desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan pada tahun 2019 adalah sebanyak 950 desa/nagari atau sekitar 81,97%, dan sekitar 65,15% penduduk miskin tersebut berada di wilayah pedesaan yang menggantungkan ekonominya pada hasil hutan. Bentuk-bentuk usaha ekonomi yang dijalankan masyarakat adalah Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus, madu, aren, rotan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan jasa lingkungan seperti pemanfaatan air, pengembangan energi mikro hidro, pengembangan ekowisata, dan lain sebagainya. Pengembangan usaha ekonomi produktif non kehutanan seperti ternak sapi, kompos, biogas, kerajinan rumah tangga, dan lain sebagainya.
3. KA PARAK (Kegiatan Peningkatan Hutan Rakyat)
Inovasi "KA PARAK" untuk memotivasi, meningkatkan kesadaran dan merubah pola pikir masyarakat agar melakukan penghijauan lahan dan lingkungan. Ruang Lingkup Inovasi meliputi Sosialisasi program KA PARAK kepada masyarakat di Wilayah Kelola UPTD KPHL Sijunjung, Penyediaan bibit, pembuatan lubang tanam, penanaman dan pemeliharaan oleh masyarakat dan Monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian dari program yang dijalankan.

4. Inovasi Ketahanan Pangan dan Pertanian Organik
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan lima program inovatif untuk mewujudkan ketahanan pangan, yakni distribusi pangan melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Nagari Beternak, Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan), pertanian beras organik, dan diversifikasi olahan ikan untuk meningkatkan keanekaragaman masakan berbahan baku hasil kelautan dan perikanan.
5. Pengembangan Objek Wisata pada Lokasi Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS)
Peninggalan kota lama tambang batubara Sawahlunto ini adalah warisan budaya dunia ke-5 Indonesia yang telah diakui UNESCO. Mulai tahun 2020 hingga tahun ini melalui fasilitasi Pemerintah Sumatera Barat telah mengembangkan **kawasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) "Emil Salim"** yang merupakan bagian pengembangan Sawahlunto sebagai WTBOS.
6. Pandai Sikek sebagai Nagari Taxus
Pada tanggal 30 November 2021 Gubernur Sumatera Barat mencanangkan Pandai Sikek menjadi "Nagari Taxus" karena keberhasilan KTH Taxus Singgalang mengembangbiakkan tanaman Cemara Sumatera (*Taxus Sumatrana*) y sebagai antikanker yang tumbuh di daerah tropis pegunungan.
7. Penataan Kawasan *Fly Over* Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Penataan kawasan *fly over* melalui pengembangan potensi area seperti pembangunan taman dan desain kawasan *fly over* yang akan memberi nilai tambah kawasan dan memberi *multiplier effect* bagi pariwisata Sumatera Barat sebagai sektor yang akan dikembangkan dalam penerapan ekonomi hijau
8. Pengolahan Eceng Gondok Menjadi Kerajinan Tangan
Pemerintah Provinsi, Pemkab Kabupaten dan PT. PLN (Persero) UPDK Bukittinggi telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi pelatihan dan pendampingan,

produksi dan pengembangan pasar kerajinan eceng gondok selama 3 tahun melalui program CSR Perusahaan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif masyarakat sekitar danau sekaligus percepatan pemulihan pencemaran danau maninjau

9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Wetland dalam Rangka Penyelamatan Ikan Asli Danau Maninjau

Dalam rangka konservasi kehati dan ikan asli Danau Maninjau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi melalui dana pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat membuat sistem Lahan Basah Terapung/*Floating Treatment Wetlands* (FTW), Rasau Lindung, Penyediaan Bibit ikan asli danau, Penyediaan Papan informasi dan edukasi dan Penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dan pengembangannya akan bekerjasama dengan PT. Semen Padang melalui dana CSR perusahaan.

10. Pelaksanaan KKN Tematik Program Kampung Iklim Mahasiswa UNP di Kampung Iklim Sumbar

Salah satu upaya dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak adalah dengan membentuk Kampung Iklim. Salah satu strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan komitmen Presiden Jokowi terbentuknya 20.000 kampung iklim pada tahun 2024 diantaranya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain pelaksanaan KKN Tematik Program Kampung Iklim (Proklim) oleh Mahasiswa Universitas Negeri Padang KKN dan dukungan pendanaan oleh PT. Semen Padang untuk menunjang upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi Kampung Iklim di Provinsi Sumatera Barat.

11. Pengembangan Program Sekolah *Asuah* Adiwiyata

Ruang lingkup Pengembangan Program Sekolah *Asuah* Adiwiyata di Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan PT. Tirta Investama melalui program CSR perusahaan meliputi Pembinaan persiapan menuju

Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri dan Pengembangan fasilitas fisik dan non fisik dalam mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah.

12. Pengelolaan Sampah Berbasis Nagari

Proses pengelolaan sampah yang dikembangkan dalam pengelolaan sampah berbasis nagari adalah dengan metoda bioteknologi, yaitu pemanfaatan ulat maggot BSF untuk mereduksi sampah yang menghasilkan pakan alternatif ikan dan ternak, pakan ikan hias, residu penguraian sampah oleh ulat maggot BSF berupa kasgot dapat dijadikan pupuk organik.

Percontohan budidaya maggot BSF skala nagari diantaranya Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan pemberian becak motor sampah yang dimodifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

13. Pelaksanaan Kampanye Simpatik

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan rombongan Dirut Semen Padang membagikan tempat sampah untuk kendaraan bermotor dan botol minuman isi ulang kepada pengendara di jalan Sudirman, Padang sebagai kampanye simpatik usai upacara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia

14. Program 100 ribu Millennial Entrepreneur, Women Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ruang lingkup inovasi ini meliputi *Entrepreneur Success Challenge* (ESC) Sumatera Barat merupakan program kompetisi yang memberikan kesempatan kepada generasi milenial Sumatera Barat yang berani berwirausaha yang terselenggara atas kolaborasi Wakil Gubernur Sumatera Barat selaku Tokoh Milenial Sumbar, Audy Joinaldy dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI), Sekolah Bisnis IPB University dan *Eragon Digital Company* berbasis sumber daya lama dan kearifan lokal.

15. Inisiasi *Private Sector* untuk Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup: Konservasi Energi Melalui Pemanfaatan Gas Buang Dengan Teknologi *Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG)*.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong komitmen PT Semen Padang terkait konservasi energi adalah melakukan efisiensi energi berupa pemanfaatan gas buang yang dikonversikan menjadi energi listrik melalui teknologi *Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG)* pada *line* pabrik Indarung V. Dengan beroperasinya WHRPG terdapat pengurangan pemakaian listrik PLN, peningkatan kinerja *Electrostatic Precipitator*, penurunan pemakaian air pendingin yang dibuang ke lingkungan, penurunan pemakaian air pendingin *conditioning tower*, penurunan temperatur gas buang *cooler*, dan pengurangan emisi CO₂.

7. Penutup

Dalam kurun tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran APBD untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau sebesar Rp. 411.636.579.077,- pada sektor pertanian, perikanan peternakan, pangan dan kehutanan, sektor pariwisata, sektor energi, sektor lingkungan. Alokasi anggaran untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, pangan dan kehutanan dengan total anggaran sebesar Rp. 333.913.976.337,- sektor pariwisata mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 33.824.826.734,- dan sektor energi mengalokasikan anggaran melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp. 19.511.712.133,- serta sektor lingkungan sebesar Rp. 21.580.299.087,-.

Apabila dibandingkan dengan total APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, alokasi anggaran berhubungan langsung pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Alokasi dana untuk pengembangan ekonomi hijau tidak hanya berada pada sektor lingkungan hidup saja tetapi juga berada pada sektor ekonomi lainnya.

Sumatera Barat akan terus berkreasi dan berinovasi untuk menjawab tantangan kedepannya. Beberapa program dan strategi tindak lanjut kedepannya yang diharapkan mampu menjawab tantangan permasalahan lingkungan antara lain Kebijakan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2022 melakukan kajian Naskah Akademis Pengelolaan Persampahan di Sumatera Barat yang dilanjutkan Tahun 2023 dengan Pembahasan Ranperda Pengelolaan Persampahan di Sumatera Barat (Penetapan Perda Pengelolaan Persampahan), melakukan kajian *Feasibility Study* (FS) Pengembangan Pengelolaan Sampah melalui *Bioteknologi* di TPA Regional Sumatera Barat (TPA Regional Payakumbuh) dan dilanjutkan pada tahun 2023 menyusun *Detail Engineering Desain* (DED) *Bioteknologi* di TPA Regional Sumatera Barat (TPA Regional Payakumbuh). Pengembangan Agrowisata dengan melibatkan komponen masyarakat/kelompok-kelompok sadar wisata.

Upaya untuk mengatasi kerusakan lahan yang telah di inisiasi beberapa tahun ini tetap akan dilanjutkan dan terus dikembangkan kedepannya, seperti pengembangan ekowisata, perhutanan sosial, taman Kehati, pengembangan *wetland*, dan lain-lain.

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jln. Kahtib Sulaiman No 22 Padang